

# **SKRIPSI**

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA  
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**NUZUL RAMADHAN RAHMAN**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA  
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUZUL RAMADHAN RAHMAN  
A31116314**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI


disusun dan diajukan oleh

**NUZUL RAMADHAN RAHMAN**  
**A31116314**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 27 Januari 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si., AK., CA., CRA., CRP  
NIP 19651127 199103 2 001

Pembimbing II



Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA  
NIP 19681125 199412 2 002



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si, Ak, CA., CRA., CRP., CWM   
NIP 196604051992032003

# SKRIPSI

## PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

**NUZUL RAMADHAN RAHMAN**

**A31116314**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **27 Januari 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si., AK., CA., CRA., CRP	Ketua	1. 
2	Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2. 
3	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CA, CRA, CRP	Anggota	3. 
4	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM 4

NIP 196604051992032003

# PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nuzul Ramadhan Rahman

NIM : A31116314

departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Nuzul Ramadhan Rahman.

Nuzul Ramadhan Rahman

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti diberikan kesehatan, kesempatan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada ibu Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si., AK., CA., CRA., CRP, bapak alm. Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA dan ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E.,Ak., M.Si, CA dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selaku pembimbing yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada kedua Orang Tua, beserta keluarga dari penulis atas dukungan penuh yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Desy Septiani yang telah banyak membantu dengan sabar dan mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa juga penulis sampaikan terimakasih kepada kawan-kawan penulis diantaranya Tariq Hidayatullah, Rio Elton Josua, Muh.Resa Saputra, Fadhil Paluseri, teman-teman RRP, serta teman-teman FAM16LIA yang memberikan dukungan, saran, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam bidang akuntansi.

Makassar, 27 Januari 2022

Nuzul Ramadhan Rahman

## ABSTRAK

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-BUDGETING* DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI.**

***THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION *E-BUDGETING* SYSTEMS AND HUMAN RESOURCE COMPETENCE ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS WITH ORGANIZATIONAL CULTURE AS MODERATION VARIABLES.***

Nuzul Ramadhan Rahman  
Nirwana  
Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-budgeting* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dengan total sampel sebanyak 52 responden pejabat yang menjalankan fungsi keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan pendekatan *partial least square* yang diolah menggunakan *smartPLS* 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan budaya organisasi dapat memoderasi secara positif signifikan hubungan antara implementasi *e-budgeting* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: implementasi *e-budgeting*, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan, budaya organisasi.

*This research aims to analyze the effect of the implementation e-budgeting systems and human resource competencies on the quality of financial statement with organizational culture as a moderation variable. The data used in this study are primary in the form of a questionnaire with a total sample of 52 respondents from official who carry out financial function in local government organization in city of Makassar. The method used is a quantitative approach and partial least square approach. The results showed that the implementation of e-budgeting systems has a positive significant effect the quaity of financial statements and human resource competence has not a positive significcant effect the quality of financial statements, while organizational culture could significantly moderate the relation between the implementation of e-budgeting systems and human resource competence on the quality of financial statements.*

Keywords: implementation of *e-budgeting* systems, human resource competency, quality of financial statements, organizational culture.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian .....	13
1.4.1 Kegunaan Teoretis .....	13
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori .....	15
2.1.1 Teori Agensi .....	15
2.1.2 Implementasi <i>e-budgeting</i> .....	16
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	19
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	21
2.1.5 Budaya Organisasi .....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran .....	32
2.4 Rumusan Hipotesis .....	32
2.4.1 Pengaruh Implementasi <i>E-Budgeting</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	33
2.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	35
2.4.3 Pengaruh Budaya organisasi terhadap hubungan Antara implementasi E-Budgeting dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	40
3.2 Tempat dan Waktu .....	41
3.3 Populasi dan Sampel.....	41



3.3.1 populasi.....	41
3.3.2 sampel.....	42
3.4 Sumber Data .....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	43
3.7 Metode Analisis Data.....	46
3.7.1 Statistik Deskriptif .....	47
3.7.2 Outer Model.....	47
3.7.3 Inner Model.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Rancangan Penelitian .....	50
4.1.1 Proses pengumpulan data penelitian.....	50
4.1.2 Deskripsi karakteristik responden .....	51
4.2 Analisis Data .....	52
4.2.1 Analisis statistik deskriptif .....	52
4.2.2 Model struktural variabel konstruk .....	54
4.2.3 Uji validitas dan Uji realibilitas.....	55
4.2.4 Merancang <i>inner model</i> .....	60
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
4.3.1 Pengaruh Implementasi <i>E-budgeting</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	65
4.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	67
4.3.3 Pengaruh Implementasi <i>E-budgeting</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderating .....	68
4.3.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderating .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
3.1 Daftar Kantor Dinas dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar .....	41
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	45
4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian.....	50
4.2 Rincian Penyebaran Kuisisioner .....	51
4.3 Data Karakteristik Responden .....	52
4.4 Statistik Deskriptif .....	52
4.5 Outer Model ( <i>Outer Loading</i> ).....	56
4.6 Outer Loading Akhir.....	58
4.7 Pengukuran dengan Kriteria AVE .....	59
4.8 Pengukuran Kriteria AVE (Akhir) .....	59
4.9 Pengukuran dengan <i>Composite Reliability</i> .....	60
4.10 R Square .....	61
4.11 Bootstrapping (koefisien jalur) Hipotesis 1 .....	63
4.12 Bootstrapping (koefisien jalur) Hipotesis 2.....	64
4.13 Bootstrapping (koefisien jalur) Hipotesis 3.....	64
4.14 Bootstrapping (koefisien jalur) Hipotesis 4.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Tren Hasil Pemeriksaan BPK.....	4
2.1 Alur Proses <i>E-Budgeting</i> .....	18
2.2 Kerangka Pemikiran.....	32
4.1 Merancang Model Struktural Variabel Konstruk .....	55
4.2 Outer Model.....	56
4.3 <i>Bootstrapping</i> PLS .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata .....	80
2 Kuisisioner Penelitian .....	81
3 Hasil Olah Data.....	92

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemerintah perlu membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan APBN atau APBD selama satu periode tertentu. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban lembaga eksekutif yang berperan sebagai agen yang menjalankan roda pemerintahan terhadap lembaga eksekutif sebagai *principal*. Kedua lembaga ini memiliki kepentingan yang berbeda, pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan tentunya memiliki pengetahuan yang lebih sehingga dapat menentukan informasi apa yang akan disampaikan kepada lembaga legislatif.

Tujuan utama dari pembuatan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun harus berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang berisi informasi posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD diharapkan dapat menggambarkan kinerja keuangan yang sesungguhnya sehingga dapat memberikan informasi yang berkualitas. Pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan fungsi akuntansi dan fungsi anggaran, selain itu

budaya organisasi juga sangat diperlukan dalam menunjang kinerja organisasi yang lebih baik. Perkembangan teknologi khususnya dalam proses penganggaran juga berperan penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dalam hal ini sistem *e-budgeting*.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini terdiri atas 7 komponen, yaitu : neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Laporan keuangan pemerintah ini memiliki fungsi yang penting, diantaranya laporan keuangan memberikan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Selain itu laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada public (Pintari : 2019).

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC No 8) tentang kerangka konseptual laporan keuangan, informasi keuangan yang berkualitas adalah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu, karakteristik kualitatif fundamental yaitu informasi keuangan yang relevan dalam pengambilan keputusan serta bersifat lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Selain itu laporan keuangan dapat dibandingkan sehingga memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan item-item laporan keuangan, laporan keuangan juga harus dapat diverifikasi artinya pengamat berpengetahuan dan independen serta laporan keuangan dilaporkan tepat waktu sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dan dipahami.

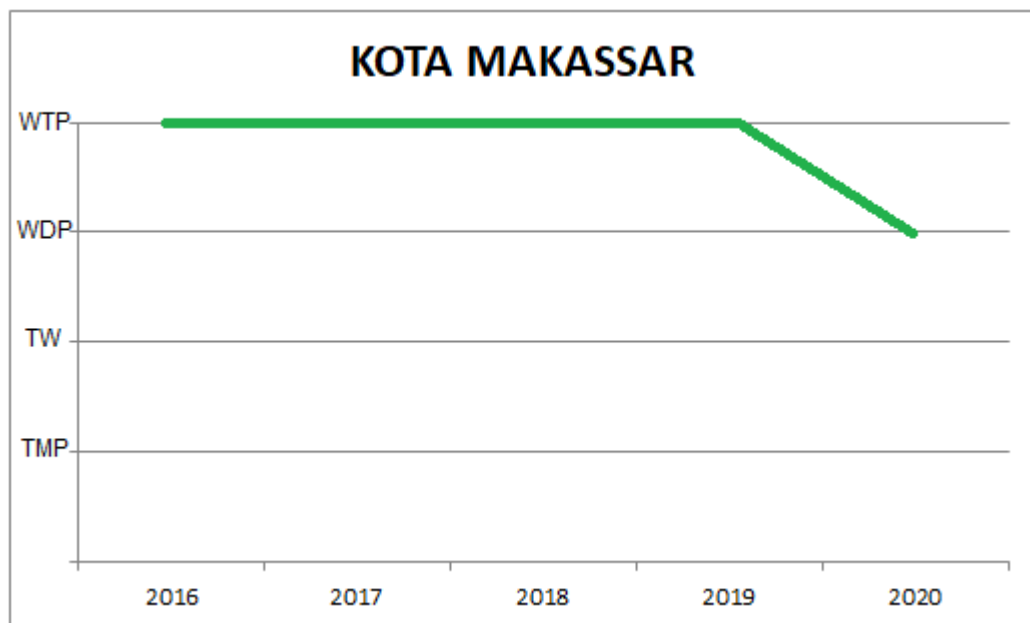
Selanjutnya, LKPD ini akan melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghasilkan sebuah opini. Terdapat empat opini BPK yang dapat diberikan pemeriksa, diantaranya opini wajar tanpa

pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. LKPD yang memiliki kriteria sistem pengendalian internal yang memadai dan tidak terjadi salah saji material atas pos-pos laporan keuangan serta telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Adapun LKPD Opini Wajar dengan Pengecualian diberikan jika LKPD tersebut memenuhi kriteria diantaranya memiliki sistem pengendalian internal yang memadai meskipun masih terdapat salah saji material pada beberapa pos laporan keuangan, oleh karena itu pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya opini tidak wajar diberikan kepada LKPD yang sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan, secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Terakhir opini tidak memberikan pendapat diberikan jika terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak memiliki cukup bukti dan atau sistem pengendalian internal yang sangat lemah. Opini BPK tersebut menggambarkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan oleh faktor intern organisasi dan ekstern organisasi. Faktor intern organisasi ini meliputi kelemahan akuntabilitas keuangan, kelemahan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, kelemahan proses pengadaan barang dan jasa, dan kelemahan sumber daya manusia. Adapun faktor ekstern organisasi meliputi kelemahan regulasi, kelemahan kelembagaan, dan kelemahan sistem pengendalian intern.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2018, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 LKPD yang memperoleh opini WTP sebesar 411 (76%). Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP terdapat 18 atau (3%), sisanya 112 LKPD memperoleh opini WDP dan TW atau sebesar (21%). Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa telah ada perbaikan sistem pengolahan dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun disisi lain masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa pada tahun 2018 ditingkat pemerintah daerah terdapat kelemahan SPI sebanyak 6.222 permasalahan. Adapun kelemahan SPI ini meliputi kelemahan atas akuntansi dan pelaporan, kelemahan atas pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

**Gambar 1.1 Tren Hasil Pemeriksaan BPK**



(Sumber : BPK-RI melalui publikasi [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK menunjukkan bahwa selama 2016 – 2019 LKPD Pemerintah Daerah Kota Makassar memperoleh opini Wajar



Tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Makassar telah mengalami peningkatan kualitas sejak tahun 2014 yang hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian dikarenakan pada tahun tersebut BPK menemukan beberapa temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar khususnya dalam proses penilaian aset tetap yang disajikan tidak wajar. Namun Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Makassar tahun 2020 kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sejak tahun 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Makassar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan upaya perbaikan melalui proses inventarisasi, pengukuran, dan penilaian kembali atas aset tetap tanah dan aset tetap yang memiliki belanja pemeliharaan namun tidak dikapitalisasi. Selain itu peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar dengan melakukan perbaikan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan laporan keuangan disajikan dan dilaporkan sesuai dengan SAP. Hal ini berhasil mempengaruhi kualitas laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut sejak 2015-2019.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Makassar pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan terdapat beberapa temuan BPK diantaranya, terdapat akun utang pribadi sebesar Rp.450.000.000 di salah satu Rumah Sakit Daerah, kurangnya volume pekerjaan yang terkait dengan infrastruktur, dan terdapat pengadaan barang diluar perencanaan kegiatan sebesar Rp.1.000.000.000. Hal ini yang menyebabkan sehingga LHP Kota Makassar Tahun 2020 mengalami penurunan.

Pemerintah Kota Makassar melalui peraturan pemerintah terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan mulai menerapkan sistem penganggaran berbasis teknologi yang disebut *e-budgeting*. Sosialisasi penerapan *e-budgeting* telah dimulai sejak tahun 2017. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, kualitas, pengawasan kinerja pemerintahan, serta membentuk transparansi pengelolaan keuangan yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel di Kota Makassar. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar telah menerapkan beberapa sistem informasi berbasis digital diantaranya SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah), SIADINDA (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Dinas Daerah), SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Daerah), CEK DPTA (Cek Dokumen Pencairan), LPSE (Layanan Pengadaan Secara Online), dan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum). Layanan ini tentunya akan mempengaruhi kualitas informasi keuangan yang akan dihasilkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Dalam penyusunan anggaran program daerah ditemukan berbagai bentuk inkosistensi karena tidak berpedoman pada regulasi yang berlaku sehingga menyebabkan proses penganggaran memakan waktu lama yang berdampak pada keterlambatan proses penyampaian dan pengesahan anggaran oleh pihak legislatif. Inkosistensi perencanaan dan penganggaran ini menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kualitas pelaporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya aspek konsistensi dan ketepatan waktu informasi keuangan. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah terkait anggaran pendapatan dan belanja dari aspek perencanaan maupun penyusunan anggaran, maka setiap pemerintah daerah harus menerapkan *e-budgeting* mulai tahun 2017. Hal ini diatur dalam UU

No 23 tahun 2014 dan Pemendagri No 86 Tahun 2017 pasal 14 yaitu Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan berbasis pada *e-budgeting*.

Implementasi *e-budgeting* diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran, hal ini ditunjukkan dengan adanya efisiensi biaya, ketepatan waktu dalam proses penyusunan ataupun pelaporan anggaran, terdapat kemudahan dalam mengakses informasi baik oleh pengelola maupun pengguna, keandalan sistem, serta dapat menghasilkan informasi yang akurat dan lengkap. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2017-2019.

Kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana operasional organisasi di Pemerintah Kota Makassar tentu menjadi salah satu faktor dalam pencapaian LHP BPK sejak 5 tahun terakhir. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia memberikan pendidikan dan pelatihan terkait deskripsi jabatan, peran, dan fungsi untuk menunjang kinerja pegawai. Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat penting dalam kepemimpinan pemerintahan daerah.

Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia menjadi faktor penting laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang

bersangkutan. Salah satu permasalahan mendasar penyebab BPK tidak memberikan opini WTP adalah sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan daerah masih ada yang kurang kompeten dan kurang memahami akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, serta organisasional tentang pemerintahan. Penelitian oleh Irzal (2017) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaksana sistem berperan penting dalam proses operasionalisasi organisasi dan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.

Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2016 melakukan pelatihan-pelatihan untuk 2.357 Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan keterampilan kerja, melalui pelatihan bela negara untuk meningkatkan kedisiplinan PNS dan memperkuat komitmen bersama dalam pelayanan publik. Menurut Wriston dan Esposito dalam (Nurrendah : 2015) bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan hasil audit untuk kepentingan manajemen dan prinsipal harus mendapat bantuan penuh dari manajemen organisasi, dewan komisaris, serta komite audit. Tiga indikator penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai operator atau pelaksana sistem yaitu, pengetahuan akan standar dan peraturan, keterampilan serta *skill* khususnya yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.

Budaya organisasi menjadi salah satu faktor yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai, norma dan kepercayaan yang disepakati dan memberi makna serta pedoman dan menjadi karakteristik bagi organisasi dalam bersikap (Yasin,2013). Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan rencana strategis dan rencana operasional organisasi sehingga secara langsung maupun tidak

langsung dapat berpengaruh terhadap kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan.

Budaya organisasi berfungsi dalam mempermudah timbulnya komitmen pada suatu tujuan yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang (Robbins dan Judge,2008). Hal ini menunjukkan budaya organisasi berhubungan dengan aspek subjektif seseorang dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi. Oleh karena budaya organisasi penting dalam menunjang peningkatan kinerja jangka panjang suatu organisasi sehingga budaya organisasi harus terimplementasikan dalam setiap organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi penunjang pegawai organisasi untuk bekerja sesuai prinsip yang terkandung dalam standar akuntansi atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kota Makassar dalam kegiatan operasional pemerintahan juga menerapkan budaya organisasi kepada setiap pegawai dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil nilai-nilai dan norma-norma organisasi yang berlaku. Sejak tahun 2017 Pemerintah Kota Makassar melakukan inovasi dengan menciptakan budaya organisasi yang disebut Pelayanan *Sombere*. Namun masih terdapat beberapa praktik kecurangan dalam pelaksanaan pemerintahan seperti penggelapan uang negara, praktik nepotisme, dan berbagai tindakan tidak disiplin lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai serta pelibatan seluruh pegawai dalam proses penyusunan tujuan, strategi organisasi, dan nilai-nilai dalam budaya organisasi. Menurut Robbins (2003) budaya organisasi yang efektif ditandai dengan beberapa indikator seperti

inovasi dan pengambilan risiko, orientasi terhadap detail, tim dan individu, agresivitas pegawai serta kestabilan nilai atau norma.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang kualitas laporan keuangan salah satunya penelitian yang dilakukan Wahyu Setyawan (2020) mengenai pengaruh implementasi *e-budgeting* dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-budgeting* dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Irzal Tawaqal dan Suparno (2017) tentang pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Sistem informasi akuntansi, Sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Mery dkk (2017) tentang pengaruh pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya etis organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Reni Yendrawati (2013) tentang pengaruh sistem pengendalian internal dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Sedangkan kapasitas

sumber daya manusia menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun faktor eksternal sebagai variabel moderasi hanya menunjukkan pengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal.

Selain itu, terdapat penelitian yang tidak mendukung teori tersebut salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Yusar Sugara (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Meidylisa Patty (2019) tentang pengaruh penerapan *good governance* dan budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan kepemimpinan transformasional sebagai pemediasi. Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan *good governance* dan budaya organisasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berangkat dari uraian diatas, maka pada penelitian ini penulis ingin melihat adanya pengaruh implementasi *e-budgeting* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan serta melihat adakah peran budaya organisasi dalam memoderasi pengaruh implementasi *e-budgeting* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda terutama dalam hal penerapan sistem informasi, budaya organisasi serta kompetensi sumber daya yang dimiliki. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Wahyu Setiawan (2020) yaitu penelitian ini menggunakan budaya organisasi sebagai variabel moderasi dan tidak menggunakan variabel sistem pengendalian internal sebagai variabel independen akan tetapi menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut sehingga penelitian ini difokuskan pada pengaruh implementasi *e-budgeting* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah implementasi *e-budgeting* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Makassar ?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Makassar?
3. Apakah budaya organisasi mampu memoderasi hubungan antara implementasi *e-budgeting* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar?
4. Apakah budaya organisasi mampu memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Makassar?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Makassar.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Makassar.



3. Untuk menguji budaya organisasi dalam memoderasi hubungan antara implementasi *e-budgeting* terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Makassar.
4. Untuk menguji budaya organisasi dalam memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Makassar.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Pada bagian kegunaan penelitian menunjukkan kegunaan dan pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan bidang ilmu akuntansi khususnya sektor publik dalam membahas pengaruh implementasi *e-budgeting* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi dan dapat memberikan tambahan wawasan kepada pembaca yang didukung oleh berbagai teori yang melandasi penelitian ini.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan implementasi *e-budgeting*, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan budaya organisasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut.

### **BAB I : Pendahuluan**

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam skripsi yang memberikan jawaban atas pertanyaan terkait apa yang diteliti? Untuk apa dan mengapa penelitian dilakukan. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi deskripsi teoritis tentang variabel yang dilibatkan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini memberikan penjelasan terkait rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta metode analisis data.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan deskripsi data penelitian, hasil uji reliabilitas dan validitas data, hasil uji inner model penelitian seperti uji hipotesis dan uji *path coefficient*, serta pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi kesimpulan atas penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi berfokus pada dua individu yaitu *principal* dan agen. *Principal* mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen. Dalam beberapa penelitian akuntansi manajemen, teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat *principal*, dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen. Dalam teori agensi, informasi akuntansi manajemen digunakan untuk dua tujuan. Pertama, digunakan untuk pengambilan keputusan oleh *principal* dan agen. Dan kedua, digunakan untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat dan disetujui. Hal ini disebut dengan *performance evaluation role* yang dapat memotivasi agen untuk berusaha seoptimal mungkin. (Eko Raharjo : 2007)

Menurut Jansen & Meckling dalam ( Eko Raharjo : 2007) teori organisasi dan kebijaksanaan perusahaan sangat dipengaruhi teori agensi yang menggambarkan top manajer sebagai agen dalam suatu perusahaan, dimana manajer dan pemilik memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi sama-sama berusaha memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik namun disisi lain manajer juga mempunyai tanggungjawab memaksimalkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*.

Dalam organisasi pemerintahan, lembaga eksekutif memiliki peran sebagai *agent* dan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat berperan sebagai *principal*. Lembaga eksekutif yang berperan sebagai *agent* mempunyai lebih banyak pengetahuan tentang kondisi dan prospek pemerintah daerah. Sehingga, eksekutif dapat memilih informasi secara tepat dan meyampaikannya kepada legislatif. Menurut Halim dalam Wahyu Setyawan (2020), dalam perencanaan penganggaran APBD, eksekutif cenderung merencanakan anggaran pendapatan yang kecil namun anggaran belanja yang besar. Pertanggungjawaban eksekutif kepada legislative dapat dilihat dari laporan keuangan yang disampaikan kepada legislatif setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit dilakukan untuk memperkecil terjadinya kesenjangan informasi antara pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah dan pihak legislatif sebagai wakil rakyat. Dalam audit ini, BPK akan mengeluarkan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menggambarkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. (Wahyu Setyawan : 2020)

### **2.1.2 Implementasi *E-Budgeting***

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan UU No 23 tahun 2014, pemerintah daerah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan atau pelaksanaan anggaran, penyajian informasi anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Informasi keuangan daerah melalui Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Daerah diharapkan memenuhi prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinilai dari pernyataan yang diberikan oleh BPK.

*E-budgeting* sebagai aplikasi penganggaran adalah sebuah sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan anggaran melalui web *online* dengan berbasis pada teknologi informasi. Proses perencanaan dan penganggaran berlangsung transparan dan dapat menghindari potensi kecurangan anggaran. *E-budgeting* berisi informasi data-data keuangan melalui teknologi guna membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.

Menurut A.P. Nasution & Atika (2019), Implementasi *E-Budgeting* pemerintah daerah didefinisikan sebagai proses perencanaan dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan terkait dengan anggaran melalui interaksi antara eksekutif, legislatif, dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis) secara elektronik. *E-budgeting* bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penganggaran secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 262). Rosalina (2016) mendefinisikan *e-budgeting* sebagai sistem penyusunan anggaran pemerintah daerah secara elektronik berbasis internet dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Sistem *e-budgeting* dapat memudahkan pengguna dan pengelola anggaran dalam mengakses informasi dan penggunaannya dapat mempersingkat proses penganggaran.

Penerapan *E-budgeting* berdampak pada tertibnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjenjang. Proses penyusunannya

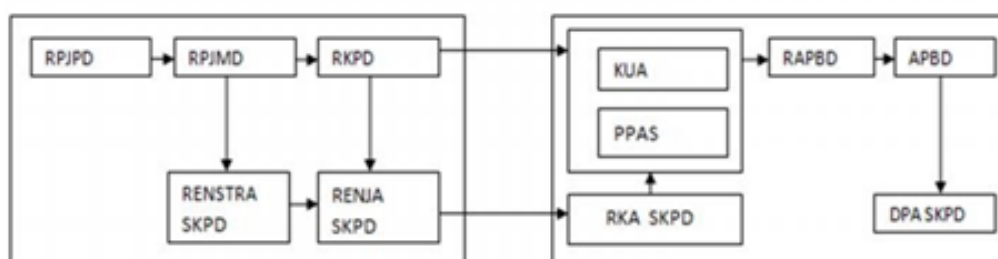
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi aspek tepat waktu substansial, efektif, efisien, responsif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sehingga dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan lebih berkualitas memiliki tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan yang terukur secara kuantitatif melalui program kerja yang dihasilkan. Hal ini akan memudahkan proses pengendalian dan pelaporan kepada *stakeholder* dan penyelenggaraannya agar lebih terarah dan konsisten. (Wahyu Setyawan:2020).

Menurut Rosalina (2016) indikator keberhasilan penerapan *e-budgeting* yaitu adanya kemudahan dalam menggunakan sistem, terdapat keandalan sistem, akurat dan lengkap, ketepatan waktu, dimengerti dan memudahkan pemakai, serta efisiensi biaya.

Adapun ruang lingkup *E-Budgeting* terdiri dari:

1. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisa Standar Belanja (ASB).
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Revisi DPA SKPD.
4. Penyusunan Perubahan APBD (PAK).

**Gambar 2.1 Alur Proses E-Budgeting**  
KETERPADUAN SISTEM E-BUDGETING



Sumber : Wahyu Setyawan (2020)

Alur proses diatas menunjukkan arah pembangunan (RPJPD dan RPJMD). Sistem ini terdiri dari tahapan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD), Rencana Kerja Satuan pemerintah Daerah (RENJA SKPD) dan *e-budgeting* yang terdiri dari RKPD yang outputnya berupa ASB-SSH dan KUA-PPAS yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (informatif dan akuntabel). Proses sistem yang menghasilkan dokumen berupa RKPD akan digunakan sebagai dasar pembuatan dokumen sistem *e-budgeting* yang berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya dokumen KUA-PPAS akan digunakan sebagai dasar pembuatan dokumen sistem *e-budgeting* yang berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Organisasi sektor publik yang menghadapi masalah penyusunan anggaran berupa deviasi anggaran yang signifikan kemungkinan akan menghadapi sinkronitas yang lebih jelas yang berdampak pada efektifitas program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik. (Wahyu : 2020). Alasan penting untuk penganggaran dalam organisasi sektor publik adalah bahwa sumber daya yang dialokasikan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun beberapa manfaat *E-budgeting* yaitu :

1. Memudahkan dalam melakukan *controlling*.
2. Kontrol dilakuakn sejak tahap perencanaan.
3. Transparansi anggaran dapat ditingkatkan.
4. Kontrol realisasi anggaran akan menjadi lebih mudah dilakukan.

### **2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (Kelembagaan) atau suatu Sistem untuk melaksanakan

fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Emilda 2014 : 3). Kompetensi merupakan kemampuan untuk mencapai suatu kinerja dalam pencapaian *output* ataupun *outcomes* suatu organisasi.

Kompetensi sumber daya manusia yang merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. (Keputusan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil)

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004) dalam As Syifa Nurillah (2014), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsinya, termasuk akuntansi dapat dilihat dari tingkat pertanggungjawaban dan kompetensi sumber daya tersebut. Suatu tanggung jawab dapat dilihat dari deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan suatu dasar dalam melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sedarmayanti (2016:286) menjelaskan dimensi kompetensi sumber daya manusia yang dilihat dari karakteristik kemampuan, mencakup:

1. Pengetahuan, terdiri dari pengetahuan akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan lain yang terkait, serta pengetahuan mengenai bisnis dan organisasi.
2. Keterampilan, terdiri dari keterampilan teknis dan fungsional, keterampilan intelektual, berorganisasi, personal, komunikasi dan intra personal.



3. Sikap, memiliki komitmen untuk kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab social, pengembangan diri, bertanggung jawab, disiplin, menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

#### **2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode tertentu. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam entitas.

Laporan keuangan daerah merupakan ringkasan dari hasil pencatatan akuntansi berupa informasi keuangan dan aktivitas pemerintah selama satu tahun buku sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja pemerintahan pada periode tertentu.

Kualitas Laporan keuangan ditentukan apabila laporan tersebut telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan informasi yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Menurut Erlina dkk (2015 :25 ) dalam Della (2019 : 16) kualitas laporan keuangan pemerintah adalah ukuran orang yang menilai atau merinci pengukuran, pencatatan, dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Winwin dan Abdullah (2017 : 7) dalam Della (2019 : 16) mengatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas merupakan output informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan, pelaporan keuangan seperti ini dapat dicapai apabila memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi yang telah memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen.

#### **2.1.4.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Tujuan utama laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, adalah menyajikan informasi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Ketujuh laporan ini menjadi komponen dalam laporan keuangan pemerintah.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), berisi kegiatan keuangan pemerintah pusat/ daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, berisi informasi terkait selisih saldo anggaran lebih tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan, unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
5. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi kas sehubungan dengan menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas.

#### **2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut beberapa ahli terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya :

Menurut Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016) :

1. Sumber Daya Manusia
2. Sistem Pengendalian Internal

### 3. Pemahaman Basis Akrua

Menurut Rukmi Juwita (2013) ada dua factor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu :

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah
2. Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **2.1.4.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah indikator-indikator normatif yang harus dicapai dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat berkualitas :

1. Relevan, laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan didalamnya dapat berguna bagi pengguna informasi dalam membuat keputusan dan membantu mereka dalam mengevaluasi kinerja organisasi dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
2. Andal, laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian menyesatkan dan kesehatan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki ciri-ciri diantaranya penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netralitas.

3. Dapat dibandingkan, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
4. Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

Menurut SFAC No 8. tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan yang bermanfaat, terdapat dua model karakteristik kualitatif antara lain :

a. Karakteristik kualitatif fundamental.

Unsur karakteristik kualitatif fundamental adalah relevansi dan representasi yang tepat. Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam pembuatan keputusan oleh pengguna. Adapun informasi representasi sempurna dimana laporan keuangan tersebut bersifat lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan.

b. Meningkatkan karakteristik kualitatif

Peningkatan karakteristik kualitatif ini ditandai dengan beberapa indikator seperti, dapat dibandingkan yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami kesamaan dan perbedaan antara item-item laporan keuangan. Selanjutnya dapat diverifikasi, artinya pengamat berpengetahuan dan independen yang berbeda bias mencapai konsensus meskipun tidak selalu perjanjian yang lengkap, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi. Adapun ketepatan waktu berarti memiliki informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan dalam waktu yang akan

memperbaharui keputusan mereka. Terakhir dapat dipahami, yaitu mengklasifikasikan, mengkarakterisasi, dan menyajikan informasi secara jelas dan ringkas akan membuat informasi tersebut dapat dimengerti.

#### **2.1.5. Budaya Organisasi**

Menurut Edy Sutrisno (2010) budaya organisasi merupakan perangkat Sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumption*), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh seluruh anggota yang menjadi pembeda organisasi satu dengan organisasi lain. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda, oleh karena itu budaya organisasi yang dibangun semestinya sejalan dengan visi, misi serta strategi dari organisasi tersebut. (Robbins : 2006).

Menurut Koesmono (2005) budaya organisasi merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu komunitas tertentu. Secara spesifik budaya dalam organisasi dipengaruhi oleh kondisi *team work*, *leaders*, dan *characteristic of organization* serta *administration process* yang berlaku. Budaya organisasi penting karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam hirarki organisasi yang mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi.

Budaya organisasi menjadi pendukung organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja organisasi sebagaimana dinyatakan oleh Deal &

Kennedy (1982), Miller (1990), Robbins (1990) dalam Edy Sutrisno (2010) karena menimbulkan :

1. Nilai-nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginternalisasi, menjiwai pada para anggota, dan merupakan kekuatan yang tidak tampak.
2. Perilaku-perilaku karyawan secara tak disadari terkendali dan terkoordinasi oleh kekuatan yang informal.
3. Para anggota merasa berkomitmen dan loyal terhadap organisasi.
4. Adanya musyawarah dan kebersamaan atau kesertaan dalam hal-hal yang berarti sebagai bentuk partisipasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap karyawan.
5. Semua kegiatan berorientasi atau diarahkan kepada misi atau tujuan organisasi.
6. Adanya koordinasi, integrasi, dan konsistensi yang menstabilkan kegiatan-kegiatan perusahaan atau organisasi.
7. Berpengaruh kuat terhadap organisasi dalam tiga aspek : pengarahannya perilaku dan kinerja organisasi, penyebarannya pada para anggota organisasi, dan kekuatannya menekan para anggota melaksanakan nilai-nilai budaya.
8. Budaya berpengaruh terhadap perilaku individual maupun kelompok.

Pada dasarnya budaya organisasi merupakan alat untuk mempersatukan setiap individu yang melakukan aktivitas secara bersama-sama. Budaya organisasi lahir dari sebuah kesepakatan yang mengarah pada suatu Sistem makna secara bersama, dianut oleh anggota organisasi. Budaya organisasi memiliki keutamaan sebagai pengendali dan arah dalam membentuk sikap dan perilaku manusia yang melibatkan diri dalam suatu organisasi. Secara individu maupun kelompok seseorang tidak akan terlepas dengan budaya organisasi.

Terdapat tujuh karakteristik primer yang berisi hakikat dari suatu budaya organisasi yang dikenal sebagai indikator budaya organisasi (Robbins,2003) yaitu:

1. Inovasi dan pengambilan risiko, berarti sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko.
2. Perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap detail.
3. Orientasi hasil, yang berarti sejauh mana manajemen berfokus pada hasil yang akan dicapai bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.
4. Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu.
5. Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, ukurannya individu.
6. Keagresifan berkaitan dengan agresivitas karyawan.
7. Stabilitas yaitu organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik.

## 2.2 PENELITIAN TERDAHULU

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Reno Julia Utama (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan Sistem pengendalian internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Skuti Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indagiri Hulu)	<b>Variabel bebas :</b> Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, Sistem keuangan daerah, sistem pengendalian internal.  <b>Variabel terikat :</b> kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan kompetensi SDM, teknologi informasi, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.



2.	Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014) Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	<p><b>Variabel bebas :</b> Kompetensi SDM, Standar Akuntansi Pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah.</p> <p><b>variabel terikat :</b> Kualitas laporan keuangan</p>	Hasil penelitian menunjukkan kompetensi SDM, standar akuntansi pemerintah, dan sistem akuntansi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Emilda Ihsanti (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya manusia dan penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota )	<p><b>Variabel bebas :</b> Kompetensi SDM, dan sistem akuntansi keuangan daerah.</p> <p><b>variabel terikat :</b> Kualitas laporan keuangan</p>	Kompetensi SDM berpengaruh secara signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Della Agustin (2019) Pengaruh kualitas Sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu)	<p><b>Variabel bebas :</b> kualitas sistem informasi akuntansi.</p> <p><b>variabel terikat :</b> Kualitas laporan keuangan.</p>	Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem informasi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan
5.	Wahyu Setyawan (2020) Pengaruh Penerapan <i>E-Budgeting</i> dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.	<p><b>Variabel bebas :</b> sistem pengendalian internal <i>E-budgeting</i>.</p> <p><b>variabel terikat :</b> Kualitas laporan keuangan</p>	Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>e-budgeting</i> dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

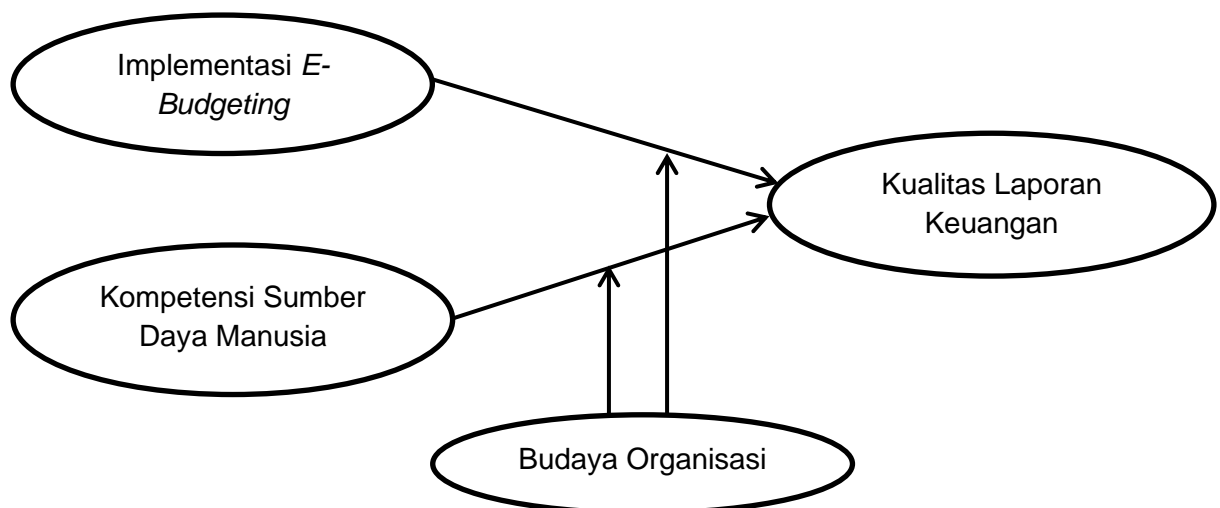
6.	Assyifa Nurillah (2014) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)	<p><b>Variabel bebas :</b> Kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal</p> <p><b>variabel terikat :</b> Kualitas laporan keuangan</p>	Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
7.	Irzal Tawaqqal, Suparno (2017) Pengaruh penerapan Sistem informasi akuntansi, Sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh	<p><b>Variabel bebas :</b> sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM</p> <p><b>variabel terikat :</b> Kualitas laporan keuangan</p>	Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
8.	Putu Mery Oktaviyanti, dkk(2017) Pengaruh pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya etis organisasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus koperasi simpan pinjam di kecamatan Buleleng)	<p><b>Variabel bebas :</b> Pengendalian Internal, Kompetensi sumber daya manusia, dan budaya etis organisasi</p> <p><b>variabel terikat :</b> Kualitas laporan keuangan</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

9.	Reni Yendrawati (2013) Pengaruh Sistem pengendalian internal dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan factor eksternal sebagai variable moderating	<p><b>Variabel bebas :</b> sistem pengendalian internal, dan kapasitas SDM.</p> <p><b>Variabel moderasi :</b> factor eksternal</p> <p><b>variabel terikat :</b> Kualitas laporan keuangan</p>	Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Kapasitas SDM berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan faktor eksternal dapat digunakan sebagai pemoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan namun tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi kualitas SDM terhadap kualitas informasi laporan keuangan
10.	Meidylisha Patty (2019) Pengaruh Penerapan Good Governance dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kepemimpinan Transformasional sebagai Pemediasi	<p><b>Variabel bebas :</b> Good Governance dan Budaya Organisasi</p> <p><b>Variabel terikat :</b> Kualitas laporan keuangan</p> <p><b>Variabel mediasi :</b> Kepemimpinan Transformasional</p>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa good governance berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan <i>good governance</i> dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, serta <i>good governance</i> dan budaya organisasi melalui kepemimpinan transformasional secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran sementara terhadap suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan analisis pada landasan teori dan penelitian sebelumnya. Kerangka pemikiran menjadi argumentas dasar dalam merumuskan hipotesis. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh Implementasi *E-Budgeting* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi pemerintah daerah Kota Makassar yang digambarkan melalui kerangka berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



### 2.4 Rumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu di uji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, lalu dirumuskan hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **2.4.1 Pengaruh Implementasi *E-budgeting* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam konsep akuntansi, akuntabilitas merupakan tugas untuk menyediakan informasi, termasuk dalam hal ini informasi keuangan. Menurut Gray (1987) akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi hubungan antara *agent* dan *principal*. Akuntabilitas mengacu pada hubungan dimana prinsipal memiliki kemampuan untuk memperoleh jawaban dari agen atau pertanyaan terkait perilaku mereka. Sedangkan agen diberi tanggung jawab dan menyajikan penjelasan atas pelaksanaan kepemimpinannya. Dalam organisasi sektor publik, pihak eksekutif sebagai agen harus bertanggung jawab terhadap pihak legislatif sebagai prinsipal. Penerapan teori agensi dapat terwujud dalam hubungan kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan bersama. Kontrak kerja berisi seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme kerja, mekanisme bsgi hasil, serta risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen

Akuntabilitas dalam sebuah organisasi dapat dilihat dari adanya pelaporan keuangan yang dilakukan oleh agen terhadap prinsipal. Informasi keuangan yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik seperti memenuhi aspek relevan, andal, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi serta dapat dibandingkan. Aspek ini dapat terwujud melalui beberapa faktor, salah satunya penerapan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi berperan dalam pengolahan data- keuangan untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

*E-budgeting* merupakan suatu sistem informasi yang terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menghasilkan output berupa dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS), yang penyusunannya melibatkan semua pihak untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian antara dokumen perencanaan, penyusunan dan realisasi anggaran pada LKPD (Wahyu Setyawan, 2020). Proses penganggaran dalam sistem *e-budgeting* dapat mencegah dari kesalahan dalam data laporan keuangan, menjaga konsistensi program dan anggaran serta penyusunan LKPD dapat tepat waktu. Rosalina (2016) mendefinisikan *e-budgeting* sebagai sistem penyusunan anggaran pemerintah daerah secara elektronik berbasis internet dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Sistem *e-budgeting* dapat memudahkan pengguna dan pengelola anggaran dalam mengakses informasi dan penggunaannya dapat mempersingkat proses penganggaran. Oleh karena itu, penerapan *e-budgeting* berdampak pada kualitas pelaporan keuangan dari aspek relevansi dan reliabilitas informasi keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Wahyu Setyawan (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan Richi *et al* (2015) juga menunjukkan bahwa penggunaan fitur *e-budgeting* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Srivastava (2011) menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* baik dalam hal kebijakan pemerintah, administrasi pelayanan publik, laporan rencana dan realisasi anggaran berpengaruh positif terhadap tingkat kualitas informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah sehingga berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan publik dalam hal transparansi anggaran. Kualitas sistem *e-budgeting* dapat menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas pula dikarenakan informasi nya memenuhi karakteristik kualitatif laporan

keuangan yaitu relevan, *reliable*, dan akurat untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka hipotesis yang dapat digunakan adalah :

**H1 : Implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.**

#### **2.4.2 Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Secara spesifik, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Prinsipal dapat mengendalikan perilaku agen dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan mengeluarkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang. Setiap organisasi menjalankan model agensi dalam operasionalisasi kegiatan.

Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan telah diberikan oleh pihak *principal* kepada pihak *agent*. Dalam sebuah organisasi SDM merupakan *human capital*. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dimiliki untuk menghasilkan kinerja profesional dan *economic rent*. Agen sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses operasionalisasi hingga pengambilan keputusan suatu organisasi seharusnya memiliki *human capital* yang tinggi. Hal ini memungkinkan agen dapat memberikan pelayanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (Kelembagaan) atau suatu Sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Emilda : 2014). Manusia merupakan elemen yang berperan penting dalam menghasilkan informasi yang berkualitas, manusia yang dapat melakukan analisis apakah informasi yang disajikan telah lengkap dan relevan atau tidak. Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem diharuskan memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan memiliki kemauan untuk terus belajar.

Kompetensi sumber daya manusia yang merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. (Keputusan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil). Sedarmayanti (2016:286) menjelaskan dimensi kompetensi sumber daya manusia yang dilihat dari karakteristik kemampuan, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Penelitian oleh Abdul Hafiz Tanjung (2011) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal. Hasil penelitian yang dilakukan Desy Sefri Yensi (2014) menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jika kompetensi SDM memiliki latar belakang pendidikan di luar akuntansi, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Hal



ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reno Julia Utama (2017) dan penelitian oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014) serta penelitian oleh Emilda Ihsanti (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis kedua untuk meneliti kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan :

**H2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.**

#### **2.4.3 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap hubungan antara Implementasi *E-budgeting* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan.**

Hubungan agensi merupakan kondisi dimana satu atau lebih individu menyewa yang lain untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada mereka. Hak dan tanggung jawab dari prinsipal dan agen ditentukan dalam hubungan kerja yang disetujui bersama. Permasalahan agensi muncul jika perilaku kooperatif yang memaksimalkan kesejahteraan kelompok, tidak sesuai dengan kepentingan pribadi individu. Penerapan teori agensi dapat terwujud dalam hubungan kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan bersama. Kontrak kerja berisi seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme kerja, mekanisme bsgi hasil, serta risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen.

Menurut Arifin (2005) bahwa adanya posisi, fungsi, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak blakang namun

saling membutuhkan, dapat menimbulkan pertentangan dan saling tarik menarik kepentingan. Budaya organisasi dapat menjadi media dalam mengurangi konflik pertentangan kepentingan antara prinsipal dan agen tersebut. Melalui budaya organisasi dapat menciptakan lingkungan organisasi yang baik dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip kerja sama, pencapaian tujuan melalui orientasi hasil, hingga pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut Edy Sutrisno (2010) budaya organisasi merupakan perangkat Sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumption*), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh seluruh anggota yang menjadi pembeda organisasi satu dengan organisasi lain. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda, oleh karena itu budaya organisasi yang dibangun semestinya sejalan dengan visi, misi serta strategi dari organisasi tersebut. (Robbins : 2006).

Budaya organisasi menjadi pendukung organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Mery Oktaviani (2017) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Budaya organisasi dalam hal ini berfungsi mempermudah timbulnya komitmen pada suatu tujuan yang lebih luas daripada kepentingan diri individu seseorang. Lingkungan organisasi beserta nilai-nilai yang diterapkan dan diyakini oleh pegawai dapat mempengaruhi efektivitas jalannya sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi termasuk

mempengaruhi kinerja SDM dalam satu organisasi. Selain itu, penelitian oleh Alfin (2014) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan budaya organisasi maka kualitas kinerja pemerintah juga akan tercapai sehingga mampu menciptakan informasi keuangan yang berkualitas.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang baik dapat mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Budaya organisasi memoderasi pengaruh positif implementasi e-  
*budgeting* terhadap kualitas laporan keuangan.**

**H4 : Budaya organisasi memoderasi pengaruh positif kompetensi sumber  
daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.**